BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses perubahan sosiokultural yang berlangsung dalam iklim pembangunan di Indonesia telah menjamah setiap sudut kehidupan. Pesantren, sebagai salah satu subkultur sosial yang seringkali disebut orang lembaga tradisional di Indonesia, tidak luput dari jangkauan proses tersebut. Eksistensinya akan selalu ditantang oleh perubahan sebagai sebuah kebutuhan yang mengalami pergeseran nilai. Kemampuan pesantren memenuhi tuntutan pendukungnya menjadi batu ujian bagi kelangsungan eksistensinya sehingga transformasi sosio-kultural yang ditempuhnya harus senantiasa memperhatikan perubahan yang terjadi pada lingkungannya.

Menurut Edi Kusmayadi (2010), "Di pesantren telah tertanam budaya tanpa pamrih dalam mengerjakan apa saja yang diperintahkan kiai, asal pekerjaan itu baik dan bermanfaat untuk umat dan orang banyak".[1] Dalam tradisi pesantren, sikap ini disebut ikhlas dan patuh. Misalnya, kiai mengisyaratkan kepada para santrinya untuk memilih partai politik tertentu, maka mereka mematuhinya dengan dasar bahwa partai politik yang dipilihnya itu akan menegakkan politik moral, bukan hanya politik kekuasaan. Adapun di partai politik, budaya tanpa

[1] www.akhmadsatori.co.cc

pamrih dan politik moral merupakan sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi karena setiap tindakan yang dilakukan anggota partai telah terbentuk beberapa rumus politik, yaitu, (a) siapa mendapatkan apa?, (b) siapa mengalahkan siapa?, (c) siapa yang menjadisaingan?, dan (d) siapa yang menjadi teman seiring?. Jadi, di pesantren telah terbangun citra bahwa partai itu semestinya membangun politik moral sebagai salah satu basis utamanya dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, politik kekuasaan yang sudah menjadi ciri utama partai politik harus didampingi dengan politik moral agar kekuasaan yang diraihnya tidak mengarah pada penghalalan segala cara.

Sebuah pesantren bisa muncul dan terkenal biasanya karena ketokohan dan aura keulamaan kiainya. Kiai dalam konteks ini adalah simbol masyarakat santri yang santun, pandai, dan berwibawa yang sangat dihormati dan dicintai pengikutnya, bahkan oleh masyarakat luas yang simpati kepadanya. Pada sisi lain, partai politik pun bisa berkembang menjadi besar, di samping karena sistem yang dibangunnya baik dan modern juga karena pemimpin partainya pintar dan memiliki karisma besar yang mampu menyedot perhatian dan simpati masyarakat luas. Itulah sebabnya pemimpin partai itu harus mampu menjadi magnet yang dapat merebutsimpati rakyat dan harus berupaya sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyat pendukungnya.

Menurut Edi Kusmayadi (2010) tentang politik bagi pesantren adalah :

> “Dalam konteks politik moral bagi Pesantren, politik hanyalah instrumen keduniaan untuk meraih kekuasaan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Kaidah ini mempunyai konsekuensi bahwa apabila, misalnya, partai politik itu tidak mampu memotivasi dan mengarahkan masyarakat

> pendukungnya untuk meraih kekuasaan berdasarkan politik moral, politik itu menjadi tidak berguna sama sekali."[2]

Bagi para santri di Pesantren, politik harus dijalankan secara santun dan menurut kaidah politik moral yang kemudian bisa membimbing para pemegang amanah kekuasaan agar tidak keluar dari rel moral agama. Hal ini perlu ditekankan karena saat ini banyak orang yang tergelincir ke dalam *low politics*, yaitu politik praktis yang selalu mempragmatiskan persoalan yang seharusnya berada di atas nilai-nilai luhur agama dan susila. Jadi, sebuah pesantren seharusnya dapat memposisikan dirinya secara tepat dalam arus besar (*mainstream*) politik nasional dan politik daerah agar jati dirinya tetap terjaga dan citranya sebagai lembaga pendidikan tetap terpelihara.

Hal ini memang sangat sulit karena Pesantren senantiasa berada dalam arus persaingan kekuatan-kekuatan politik yang mengharapkan dukungan moral dan kontribusi suara politik dari pesantren ini melalui figur kiainya. Ketika zaman Orde Baru, tidak sedikit pesantren yang dipandang lebih condong ke sebuah partai politik besar yang ketika itu menjadi penguasa negeri ini. Akan tetapi pada zaman reformasi, ketika perundang-undangan politik Indonesia menerapkan sistem multipartai, tidak sedikit pula pesantren yang menggeser bandul politiknya ke partai-partai politik baru. Perubahan orientasi dan kontribusi suara kiai ke partai-partai politik baru diibaratkan sebuah "pasangan pengantin baru" yang sedang berbulan madu, yang kemungkinan akan mencair kembali setelah "bulan madu" itu selesai.

---

[2] www.akhmadsatori.co.cc

Dalam konteks ini, hal yang perlu diperhatikan oleh pesantrten adalah sistem nilai yang sudah lama dibangun oleh kiai dan masyarakat pesantrennya. Apabila tidak hati-hati menghadapi setiap perubahan sosial politik nasional, orientasi pesantren akan bergeser dari *tafaqquh fid-din* (mendalami agama) ke *tafaqquh fis-siyasah* (mendalami politik) yang lebih kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*). Apabila hal ini terjadi, para pengelola pesantren akan berhadapan dengan nilai-nilai baru yang bisa berdampak positif, tetapi bisa juga berdampak negatif. Dampak positif yang diperoleh pesantren adalah terbukanya akses yang lebar terhadap insfrastruktur politik dan ekonomi sehingga akan memudahkan pesantren dalam memperluas jaringan kerja sama dengan pihak luar, baik dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya, pesantren akan dikenal lebih luas oleh masyarakat nasional dan internasional. Adapun dampak negatif yang mungkin dirasakan pesantren adalah kegamangan dan kehilangan pegangan para santri dan masyarakat pendukungnya apabila sebuah pesantren terlalu jauh terjun dalam politik praktis.

Menghadapi peristiwa politik seperti pemilihan Bupati secara langsung akan sangat dibutuhkan figure individu maupun kelompok yang mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif. Hal ini memiliki tujuan untuk memotivasi pendapat umum atau mewujudkan partisipasi politik, pendidikan politik, dan perilaku politik serta dapat mengelola pesan politik secara bijaksana sesuai kebutuhan dalam pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan, seperti peristiwa politik pemilihan Bupati secara langsung yang mempunyai peranan cukup dominan adalah pada level Infrastruktur.

Oleh sebab itu kiai dan pesantrennya merupakan komunikator infrastruktur yang mempunyai fungsi politik (*input*) yaitu memberikan respon dari umpan balik atas kebijakan publik (*public policy*) yang dikeluarkan (*output*) oleh suprastruktur. Respon yang diberikan infrastruktur adalah berupa tuntutan dan dukungan yang akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan (*decision making proces*s) di konversi (diolah dan diracik) menjadi bahan pertimbangan atau alternatif untuk membuat kebijakan. Dalam proses sistem politik tersebut diungkap oleh G.A. Almond dan S. Coleman dikualifikasikan ke dalam lima kelompok, yaitu :

1) Partai politik (*political party*)
2) Kelompok kepentingan (*interest group*)
3) Kelompok penekan (*pressure group*)
4) Tokoh politik (*political figure*)
5) Alat-alat komunikasi politik (*political communication tools*)

Kelima kelompok komunikator infrastruktur tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi kehidupan politik, karena mereka memiliki kemampuan menggerakan massa dan mampu untuk memobilisasi pendapat umum agar berpihak kepada mereka. Karena itu elit suprastruktur sangat berkepentingan untuk saling berhubungan dan menjalin komunikasi dengan komunikator infrastruktur terutama dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kelompok komunikator infrastruktur tersebut selalu berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat pada waktu terjadi pergeseran atau pergantian elit kekuasaan seperti pada pemilihan umum dan pemilihan kepala negara dan kepala daerah.

Dalam mengkaji permasalahan ini maka Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan ada pada ranah atau level Infrastruktur politik yang menarik untuk diteliti dalam pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) yang notabene diisi oleh para kiai dan figur-figur pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan serta memiliki budaya partisipatif yang memiliki peranan penting di Kabupaten Kuningan. Forum Komunikasi Pondok Pesantren ini mempunyai 225 pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan yang bisa diperkirakan mempunyai santri dan simpatisan yang bisa di jumlahkan secara total ribuan orang yang terdiri dari santri, simpatisan, ataupun alumni dari pesantren-pesantren tersebut.

FKPP Kabupaten Kuningan adalah wadah para kiai pesantren yang konsen terhadap kebenaran, kejujuran dan keadilan. satu lembaga strategis baik untuk mengembangkan dakwah atau untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kapasitasnya sebagai pimpinan pesantren merupakan potensi yang sangat berharga karena mereka merupakan panutan yang dihormati dan ditaati di masing-masing wilayahnya.

Visi FKPP adalah terbangunnya keharmonisan yang kokoh antara pondok pesantren untuk mewujudkan pengembangan dan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam fungsinya FKPP merupakan penggerak gerakan moral di Kabupaten Kuningan, sehingga untuk menjalankan fungsinya perlu adanya keselarasan dengan pemerintah dalam hal ini adalah Bupati Kuningan.

Sehingga FKPP bisa menentukan arah hak suara nya pada calon bupati yang dianggap mendukung dan menguntungkan bagi FKPP di Kabupaten Kuningan.

Dalam memobilisasi masanya, FKPP melakukan komunikasi politik dengan pesantren-pesantren anggotanya untuk menyamakan suara demi *Amar Ma'ruf Nahyi Munkar*. Sehingga pada momentum pemilihan kepada daerah FKPP akan menentukan pilihannya.

Pada prinsipnya komunikasi politik menurut dahlan (1999) dalam Cangara (2009) mengatakan :

> "Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khlayak yang menjadi target politik" (Hafied Cangara, 2009:35).

Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuannya (Arifin, 2003:65-98) yaitu :

1. Retorika adalah seni berbicara yang berupa berpidato kepada orang banyak (khalayak).
2. Agitasi Politik adalah proses untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khlayak.
3. Propaganda adalah penanaman sugesti untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya.
4. Public Relations (PR) Politik merupakan suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik.

5. Kampanye Politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau organisasi dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih.
6. Lobi Politik adalah adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama yang akan diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat atau sidang politik yang akan menghasilkan keputusan sikap politik tertentu.
7. Lewat Media Massa sebagai perluasan panca indra manusia dan sebagai media pesan dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan-otoritas, membentuk dan merubah opini publik atau dukungan serta citra politik, untuk khalayak yang lebih luas yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu: **"Bagaimana Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Kasus Pada Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati Langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009) ?"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai diatas peneliti mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan terbentuk dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?
2. Bagaimana budaya komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?
3. Faktor-faktor apa yang mendasari komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?
4. Bagaimana konstruksi realitas komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?
5. Bagaimana komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan terbentuk dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendalami komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuningan.

1.3.3. Tujuan Penelitian

Sementara, untuk tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rincian identifikasi masalah yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui budaya komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendasari komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009.
4. Untuk mengetahui Konstruksi Realitas komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009.
5. Untuk mengetahui komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan Ilmu Komunikasi secara umum, secara teoritis dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Komunikasi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian adalah untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah pada permasalahan yang sedang diteliti.

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan literatur dalam mendukung materi-materi perkuliahan bagi Universitas dan Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Komunikasi, juga sebagai literatur bagi yang memerlukan atau melakukan penelitian pada kegiatan yang sama.

b. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan literatur sebagai bentuk aplikasi yang diperoleh selama Program Studi Ilmu Komunikasi serta pengetahuan baik dari segi teoritis ataupun praktisnya bagi peneliti.

c. Bagi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan

Penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan bermanfaat bagi Pihak Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, sebagai suatu pemahaman serta pertimbangan dalam melaksanakan komunikasi politik yang tepat.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik, upaya untuk mendekati pengertian apa yang dimaksud komunikasi politik, menurut Dahlan (1999) :

> "pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikit, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik". (Cangara, 2009 : 35)

Agar dapat membantu mengindentifikasi unsur – unsur yang terjadi ketika pesan-pesan komunikasi politik diarahkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak, maka dalam penelitian ini teori yang dapat dijadikan rujukan dari komunikasi politik itu sendiri mengenai perspektif komunikasi pada opini publik yang diadopsi Nimmo dari paradigma komunikasi Lasswel (Nimmo : 2005) dalam buku Komunikasi Politik komunikator, pesan dan media, yaitu :

Siapa ?
Mengatakan Apa?
Dengan Saluran Apa ?
Dengan Siapa ?
Dengan akibat apa ?
(Nimmo, 2005 : 13)

1. Siapa ? / Komunikator Politik

Komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik. Menurut Sosiolog J.D. Halloran mengungkapkan tentang komunikator massa bahwa :

> ”komunikator massa sebagai orang yang menduduki posisi penting yang peka di dalam jaringan sosial, menanggapi berbagai tekanan dengan menolak dan memilih informasi yang semuanya terjadi di dalam sistem sosial yang bersangkutan”. (Adiyana, 2008 : 58)

Apa yang dikatakan oleh Halloran tentang komunikator massa berlaku juga bagi komunikator politik. Komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Menurut Nimmo (2000:72) :

> ”Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika rangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi”. (Adiyana, 2008 : 58)

2. Mengatakan Apa ? / Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-berbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

> ”Fishbein dan Ajzen (Perloff, 1993) mengatakan bahwa pesan akan dapat mempunyai pengaruh yang besar untuk merubah perilaku khalayak jika dikemas sesuai dengan kepercayaan yang ada pada diri khalayak. Karenanya dari tujuan dan tema utama kampanye hendaknya dibuat pesan-pesan yang sesuai dengan kepercayaan khalayak”. (Venus, 2004)

3. Dengan Saluran Apa ? / Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Dalam masalah ini lebih tepat menggunakan Saluran komunikasi kelompok, misalnya partai politik, organisasi profesi, ikatan alumnim organisasi sosail keagaamaan, karang taruna, kelompok pengajian, kelompok tani dan nelayan, koperasi, persatuan olahraga, kerukunan keluarga, perhimpunan minat dan semacamnya.

4. Dengan Siapa ? / SasaranPolitik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, pedagang, dan lain lain.

5. Dengan Akibat Apa ? / efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahan terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum.

Dalam membicarakan komunikasi politik maka erat kaitannya dengan budaya komunikasi politik. budaya komunikasi politik pada kehidupan bernegara di Indonesia berkaitan dengan kampanye, agitasi, dan propaganda. Sampai tahun 2002 calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, dan pejabat-pejabat lainnya yang memerlukan pemilihan tidak pernah melakukan kampanye secara terbuka. Pada umumnya para calon tersebut tidak pernah menampakan ambisinya terhadap kekuasaan.

Hal itu melahirkan sikap bahwa bukanlah calon penguasa atau calon pemimpin yang harus aktif berkampanye untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan sebaliknya calon penguasa itu harus tenang-tenang saja, dan rakyatlah atau perwakilan dari rakyat yang ramai-ramai yang memintanya.

Jika seorang pemimpin telah dipilih, maka ia memperoleh mandat penuh dan dipandangnya sebagai suatu kepercayaan atau amanah. Konsep mandataris sebagaimana yang dikenal UUD 1945 menimbulkan anggapan bahwa sangat kurang etis atau kurang layak, jika kekuasaan diserahkan oleh rakyat kepada mandataris, kemudian dipertanyakan, dipersoalkan, atau

digugat secara terbuka dimuka umum. Dari pola pikir ini, kemudian lahir budaya komunikasi politik yang tidak terlalu terbuka pada kritik.

Meskipun demikian, memasuki era reformasi dengan segala kebebasannya budaya komunikasi politk cenderung mengalami pergeseran. Saat ini, dengan mengedepankan demokratisasi, maka budaya komunikasi politik cenderung terbuka seperti melalu media massa.

Konstruksi sosial (*Social Construction*) merupakan sebuah teori sosiologi kotemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut kedua ahli tersebut teori ini dimaksudkan sebagai satu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (”penalaran teoritis yang sistematis”), dan bukan sebagai suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Oleh karena itu, teori ini memfokuskan pada hal-hal semacam tinjauan tokoh, pengaruh dan sejenisnya, tetapi lebih menekankan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dari realitas sosialnya.

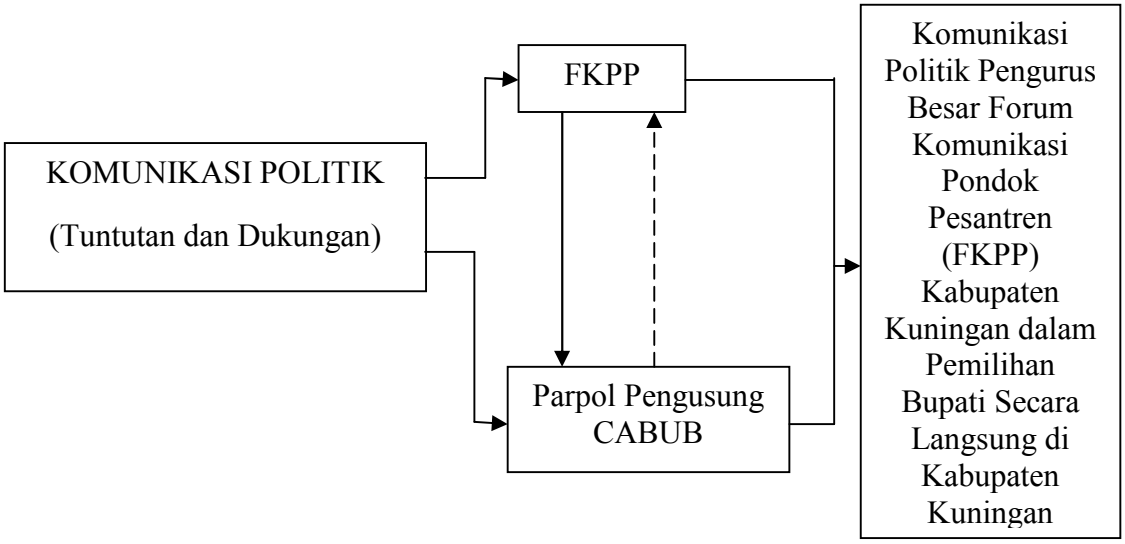
Realitas menurut Berger adalah eksis dan struktur dunia sosial bergantung pada manusia yang menjadi subejknya. Berger memiliki kecenderungan untuk mencoba menggabungkan dua perspektif berbeda, yaitu perspektif fungsionalis dan interaksi simbolik, dengan mengatakan bahwa realitas sosial secara objektif memang ada (perspektif fungsionalis), namun maknanya berasal dari dan oleh hubungan subjektif individu dengan dunia objektif (perspektif interaksionis simbolik) (paloma dalam adiyana, 2008 : 86).

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dari uraian tentang kerngka teori di atas, maka untuk mengkaji dan mendalami komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti 2011

1.6. Pertanyaan Penelitian

1. Proses Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

a. Bagaimana terbentuknya komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam menyikapi pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?

b. Bagaimana Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan Mensosialisaikan keputusan politik dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 dalam konteks komunikasi politik ?

c. Bagaimana Konsolidasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren baik di tingkat cabang-cabang maupun anggota sehingga pesan-pesan politik menjadi keputusan dan sikap politik dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?

2. Budaya Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

a. Bagaimana budaya komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati Langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?

b. Apa yang mendasari budaya komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan.

3. Faktor-faktor Yang Mendasari Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

a. Hal-hal apa yang mendasari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan melakukan komunikasi politik dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?

b. Mengapa Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan merasa perlu melakukan komunikasi politik dalam pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?

4. Konstruksi Realitas Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

a. Bagaimana realitas yang terjadi pada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati Langsung di Kabupaten Kuningan Tahun 2009 ?

Catatan : Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan dan disesuaikan di lapangan.

1.7. Subjek Penelitian dan Informan

1.7.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, subjek penelitian ini dipilih karena keunikannya. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan adalah salah satu ormas islam yang hingga saat ini masih mempertahankan eksistensinya dan FKPP merupakan komunikator dalam ranah infrastruktur komunikasi politik serta kelompok terorganisir dan pemuka pendapat yang memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam

komunikasi politik di banding dengan warga negara atau masyarakat pada umumnya.

Penulis menganggap Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan sebagai sumber informasi atau informan. Menurut *Webster's New Collegiate Dictionary* dalam adiyana slamet, "seorang informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frase, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi" (Nugraha, 2011:24).

1.7.2. Informan

Dalam menentukan informan, digunakan teknik sampling purpose. Menurut Sugiono dalam bukunya yang berjudul *Memahami penelitian Kulalitatif* dikatakan bahwa "purpoisive adalah teknik penentuan informasi dengan pertimbangan tertentu" (Sugiono, 2007 : 61).

Berikut adalah data informan dalam penelitian :

Tabel 1.1

Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	K.H. Abd. Aziz A.N	Ketua FKPP
2	K.H. Drs. Abdullah Dunun	Dewan Pembina FKPP
3	K.H. Dodo Murtadlo, Lc	Dewan Pembina FKPP
5	KH. Aman Syamsul Falah	Ketua III FKPP
6	Dadan Wildan, M.Pd	Tim Sukses Cabub

Sumber : Peneliti 2011

1.8. Metode Penelitian

Metode yang dianggap sesuai dengan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Lindlof dan Meyer, (dalam Mulyana, 2001:148-149) memasukan semua penelitian naturalistik kedalam paragdigma interpretif, varian-variannya mencakup teori dan prosedur yang dikenal sebagai etnografi, fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, psikologi lingkungan, analisis semiotika, dan studi kasus. Studi kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah sistem terbatas atau suatu kasus secara mendetail, pengumpulan data secara mendalam dari informasi-informasi (Creswell, 1998:61).

Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. **Lincoln** dan **Guba** (dalam Mulyana, 2008:201) mengemukakan bahwa keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal berikut:

1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian eknik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus memungkinkan pmbaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga kepercayaan (*tustworthiness*).
5. Studi kasus memberikan ”uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas *transferabilitas*.
6. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konstek yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus yang diamati yakni mengenai komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

Penelitian kualitatif dalam ilmu komunikasi adalah sebagai perspektif subjektif. Asumsi-asumsi dan pendekatan serta teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan dengan ciri-ciri dari penelitian yang berperspektif subjektif seperti :

1. Sifat realitas yang bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah-ubah), dikonstruksikan, dan *holistic* (pembenaran realitas bersifat relatif),
2. Aktor (subyek) bersifat aktif, kreatif dan memiliki kemauan bebas, dimana prilaku komunikai secara internal dikendalikan oleh individu,
3. Sifat hubungan dalam dan mengenai realitas,
4. Hubungan peneliti dengan subjek penelitian juga bersifat strata, empati, akrab, interaktif, timbal balik, saling mempengaruhi dan berjangka lama,
5. Tujuan penelitian terkait dengan hal-hal yeng bersifat khusus,
6. Metode penelitian yang deskriptif,
7. Analisis bersifat induktif,
8. Otentisitas adalah kriteria kualitas penelitian subyektif, dan
9. Nilai, etika, dan pilihan moral penelitian melekat dalam proses penelitian. (Mulyana, 2008:147-148).

Bodgan dan Taylor (Moleong, 2002:3) menyatakan bahwa ”pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.”

Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan dalam upaya mendapatkan data atau informasi yang diperlukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Penentuan dan teknik yang digunakan haruslah dapat mencerminkan relevansi dengan fenomena penelitian yang telah diuraikan dalam konteks penelitian.

1.9. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Untuk memperdalam lagi data yang akan diperoleh maka dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam *(Indepth interview).* Jenis wawancara ini dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan yang menjadi pokok dari minat penelitian. Pedoman wawancara mengancar-ancarkan peneliti mengenai data mana yang akan lebih dipentingkan. Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi sekadar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari informan yang nanti akan dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan, konteks, dan situasi wawancara. Agar hasil wawancara yang didapat, terekam dengan baik, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan, maka dibutuhkan alat-alat sebagai berikut:

1. Buku catatan, yang berfungsi untuk mencatat semua hasil dari *interview* dengan informan,
2. *Tape recorder*, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan pada saat *interview* berlangsung,
3. Hasil wawancara yang berisikan pertanyaan dan jawaban dari informan secara lengkap.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewe)* yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu. Maksud dari mengadakan wawancara itu sendiri, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985), dikutip dalam Moleong yakni, "untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain" (Moleong, 2002: 186).

Untuk dapat memperoleh data yang akurat peneliti telah menetapkan narasumber yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Bapak K.H. Dunun selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), bapak K.H. Mahmud Silahudin selaku anggota Nahdlatul Ulama (NU) Selaku pihak yang bersikap netral, Cecep selaku santri pondok pesantren Nurul Huda, dan tim sukses dari calon bupati yang diusung.

b. Dokumentasi

Metode atau teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Dokumen merupakan catatan yang didalamnya terdapat sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat para ahli yang berbungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah "suatu kajian, telaah literatur tertulis (buku, artikel, kitab) yang dijadikan rujukan, acuan yang bersumber resmi" (KBBI, 2008).

d. Internet *Searching* atau Penelusuran *Online*

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan *Internet Searching* untuk memperoleh data yang lebih maksimal. Sebagaimana dikutip bahwa Metode penelusuran data *Online* dalam tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online,* sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. (Bugin, 2007:125).

e. Observasi

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, Banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi, hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah.[3]

1.10. Tehnik Analisa Data

Analisis data menurut Patton (dalam Meleong, 2002:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan melalui deskripsi data penelitian, penelaahan tema-tema yang ada, serta penonjolan-penonjolan pada tema tertentu

[3] http://eko13.wordpress.com/2008/03/18/jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data, Senin, 11 April 2011, 0:42

(Creswell, 1998:61). Teknik analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian sejak penelitian memasuki lapangan untuk mengumpulkan data.

Menurut Maman (2002:3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

> Menurut **Bogdan**, analisis data adalah, "Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain" (Sugiyono, 2008:244)".

Terdapat beberapa tahap dalam analisa data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu (Huberman dan Miles dalam Bungin, 2003:69)

1. Kategorisasi data, peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang penting yang terkait dengan masalah penelitian, dan selanjutnya mengelompokan data tersebut sesuai dengan topik masalahnya.
2. Reduksi data. dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
3. Sajian data. Data yang telah terkumpul dan dikelompokan itu kemudian disusun sistematis sehingga peneliti dapat melihat dan menelaah komponen-komponen penting dari sajian data.
4. Penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi data sesuai dengan konteks permasalahan dan tujuan penelitian. Dari interpretasi yang dilakukan akan diperoleh kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian.

Triangulasi adalah tiga langkah pengumpulan data, “Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda” (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.(Nugraha, 2011:32)

1.11. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.11.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada organisasi masyarakat Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, alamat Jl. Syekh Muhibbat Rt 04/01 Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Telepon (0232) 875650

1.11.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan April sampai bulan Mei 2011. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Uraian	Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011				Agustus 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																								
	Pengajuan judul																								
	ACC Judul																								
	Bertemu pembimbing																								
	Penulisan BAB I																								
	Bimbingan																								
	Seminar UP																								
	Penulisan BAB II																								
	Bimbingan																								
	Penulisan BAB III																								
	Bimbingan																								
2	Pengumpulan data																								
	Instansi																								
	Wawancara																								
	Bimbingan																								
3	Pengolahan data																								
	Penulisan BAB IV																								
	Bimbingan																								
4	Penulisan BAB V																								
	Bimbingan																								
5	Penyusunan skripsi																								
	Bimbingan																								
6	Sidang																								

1.12. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini, dituangkan dalam skripsi yang disusun berdasarkan sistematika penulisan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, kerangka pemikiran secara teoritis dan konseptual, teknik pengumpulan dan analisis data, populasi dan sampel, lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan dan dijelaskan mengenai teori-teori berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Sementara pada bab ini berisikan uraian mengenai objek atau tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu di Kantor Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang uraian dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Uraian dari hasil penelitian berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, mencakup Komunikasi Politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dalam pemilihan kepala daerah yang peneliti peroleh melalui metode wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan *internet*

searching atau penelusuran data *online*. Kemudian dalam Bab ini akan dilakukan pula penganalisisan terhadap data-data tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan guna menjawab identifikasi masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini serta di cantumkan pula saran-saran untuk kampus Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, serta para peneliti selanjutnya.